

## Selama PPKM Objek wisata Tanah Laut tutup sementara



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/276234/selama-ppkm-objek-wisata-tanah-laut-tutup-sementara>

Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Tanah Laut, Kslimantan Selatan dan Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan Pelaihari melakukan pemantauan objek wisata dan area publik, di Kecamatan Pelaihari pada Minggu (29/8). Salah satu yang menjadi sorotan yaitu objek wisata Taman Permana, hal itu dikarenakan pengelola masih memberikan akses masuk kepada wisatawan yang ingin berkunjung. Hal tersebut sangat disayangkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Tanah Laut Muhammad Kusri. Menurut dia, selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 harusnya tidak ada objek wisata buka, hal itu mengacu pada Instruksi Bupati Tala Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang PPKM Level 4 COVID-19 di Tanah Laut.

Kepala Satpol PP dan Damkar Tanah Laut Muhammad Kusri juga mengatakan, Tim Satgas COVID-19 Tanah Laut beranggotakan Satpol PP dan Damkar Taah Laut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tabah Laut, Dinas Perhubungan Tanah Laut, Polres Tanah Laut dan Kodim 1009/TLa sebelumnya telah menyampaikan larangan membuka objek wisata selama PPKM Level 4. “Tadi kami tegur dan sampaikan juga pada pengelola wisata, untuk saat ini objek wisata ditutup sementara sampai PPKM Level 4 berakhir, jadi harus ditutup semua tempat wisata,” kata M Kusri. Dia juga

menyampaikan, mayoritas wisatawan berkunjung ke wisata Taman Permana beralasan tidak mengetahui adanya PPKM Level 4 di daerah tersebut. Padahal, sebut dia, spanduk pemberitahuan tanda ditutupnya objek wisata selama PPKM sudah terpasang di lokasi wisata tersebut.

Dia berharap, pelaksanaan PPKM Level 4 mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat di Bumi Tuntung Pandang. “Kami mengharapkan partisipasi masyarakat Tanah Laut untuk tetap menaati protokol kesehatan. Kami juga mengharapkan kerjasama pada setiap masyarakat, apabila ada wisatawan yang mau ke wisata di tempat kita. Mohon kiranya bisa menegur, sehingga mereka bisa kembali ke daerahnya masing-masing. Selain itu apabila ada potensi kerumunan para pengunjung di objek wisata, maka bisa melaporkan kepada kami, selanjutnya akan kami tindak atau bubarkan,” tegasnya. Lebih lanjut Muhammad Kusri mengungkapkan, di era digital seperti saat ini, bisa memberitahu kalau Tanah Laut sedang dalam PPKM Level 4, sehingga tidak ada lagi wisatawan luar daerah berkunjung ke wisata di daerah tersebut. “Kepada masyarakat diluar Tanah Laut untuk sementara jangan berwisata dulu ke Kabupaten Tanah Laut,” pintanya.

Sementara pada sumber yang berbeda disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno menyampaikan, dengan mengusung tema ‘Bersama Lebih Kuat, Bersama Lebih Hebat’, pihaknya optimis Indonesia siap menyongsong tahun 2022 dengan pertumbuhan di aspek pariwisata. Hal tersebut diutarakan Sandiaga melalui Siaran Pers yang ditayangkan Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) – KPCPEN, Senin (27/12/2021), di mana ia juga menyampaikan sejumlah capaian pada 2021 sekaligus target Kemenparekraf ke depan.

“Bagaimana nilai devisa pariwisata kita yang tadinya turun anjlok di 2020, kita perbaiki dan ada peningkatan di 2022, yang berangkat dari bagaimana 2021 kita benahi,” tutur Sandiaga. Pandangan optimis ini terlihat dari perkembangan produk domestik bruto (PDB) pariwisata Indonesia di tahun 2022. Terlihat dari data yang disajikan Sandiaga, bahwa PDB pariwisata Indonesia berada di angka 4,2 persen pada 2021 dan diprediksi tumbuh menjadi 4,3 persen di 2022.

“Jadi Bapak-Ibu bisa melihat nilai devisa pariwisata yang 2022 kita harapkan akan meningkat juga kontribusi PDB pariwisata yang sudah mulai stabil di angka 4,3 (persen),” kata Sandiaga. Tak hanya itu, nilai ekspor ekonomi kreatif Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan, dari tahun 2021 dengan 20,58 miliar USD, menjadi 21,28 miliar USD sesuai target 2022. “Nilai ekspor ekonomi kreatif ada di perbaikan yang cukup signifikan di 21,28 miliar dolar,” jelas Sandiaga.

Sementara untuk pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara juga diprediksi kembali bangkit seiring dengan membaiknya kondisi COVID-19 di Indonesia. Berangkat

dari angka 1,5 juta wisatawan di tahun 2021, angka ini ditargetkan tumbuh menjadi 1,8 juta sampai 3,6 juta di tahun mendatang. “Jumlah wisatawan mancanegara ini selalu dulu menjadi angka yang kita kejar, tapi kali ini begitu kita melihat angka 2020 4 juta, tahun ini perkiraan di 1,5 juta, tahun depan kita fokuskan di 1,8 sampai 3,6 juta sebagai pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Sandiaga seraya menambahkan bahwa wisatawan nusantara menjadi andalan.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/276234/selama-ppkm-objek-wisata-tanah-laut-tutup-sementara>, *Selama PPKM Objek wisata Tanah Laut tutup sementara*, 30 Agustus 2021.
2. <https://www.krjogja.com/peristiwa/nasional/menparekraf-optimis-sambut-2022-dengan-kebangkitan-parisiwata/>, *Menparekraf Optimis Sambut 2022 dengan Kebangkitan Parisiwata*, 28 Desember 2021.

#### **Catatan Berita:**

**Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025** mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

#### **Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan**

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.<sup>1</sup>
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.<sup>2</sup>
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 1 angka (1)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 1 angka (2)

2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.<sup>3</sup>

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.<sup>4</sup>

### **Program Pembangunan Nasional**

- Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.<sup>5</sup>
- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.<sup>6</sup>
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.<sup>7</sup>
- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.<sup>8</sup>
- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.<sup>9</sup>
- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.<sup>10</sup>
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.<sup>11</sup>
- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>12</sup>

### **Rincian Program Pembangunan**

---

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 1 angka (3)

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 1 angka (4)

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 2 ayat (1)

<sup>6</sup> Ibid, Pasal 2 ayat (2)

<sup>7</sup> ibid, Pasal 6 ayat (1)

<sup>8</sup> ibid, Pasal 6 ayat (2)

<sup>9</sup> ibid, Pasal 6 ayat (3)

<sup>10</sup> ibid, Pasal 7 ayat (1)

<sup>11</sup> ibid, Pasal 7 ayat (2)

<sup>12</sup> ibid, Pasal 7 ayat (3)

## Kondisi Umum

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.<sup>13</sup>
- Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.<sup>14</sup>

## **Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025**

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid, Lampiran, Bab II. Kondisi Umum, I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 1

<sup>14</sup> Ibid, Lampiran, Bab II. Kondisi Umum, I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 2

<sup>15</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 1

- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.<sup>16</sup>
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.<sup>17</sup>
- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.<sup>18</sup>
- Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.<sup>19</sup>
- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya

---

<sup>16</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 2

<sup>17</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 3

<sup>18</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 4

<sup>19</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 5

dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.<sup>20</sup>

- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.<sup>21</sup>
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.<sup>22</sup>
- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pematapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga-lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.<sup>23</sup>
- Kepariwisatahan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisatahan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 1

<sup>21</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 2

<sup>22</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 3

<sup>23</sup> Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025, Bagian II Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang, VII. Pembangunan Daerah, 4

<sup>24</sup> Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005 – 2025, Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, IV.1.2 mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing, B. Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global, 22

